

PERAN BPBD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)

KABUPATEN BANTUL DALAM MITIGASI BENCANA ALAM.



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I

Disusun Oleh:

Furqon Hasani

10250074

Dosen Pembimbing:

Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc.

NIP: 19810823 200901 1 007

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 231 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

PERAN BPPD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) KABUPATEN
BANTUL DALAM MITIGASI BENCANA ALAM.

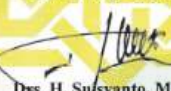
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Furqon Hasani
NIM/Jurusan : 10250074/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 26 Januari 2015
Nilai Munaqasyah : 76.16 (B)

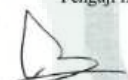
dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,


Drs. H. Susyanto, M.Pd.
NIP 19560704 198603 1 002

Penguji II,


Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc.
NIP 19810823 200901 1 007

Penguji III,


Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19701010 199903 1 002

Yogyakarta, 26 Januari 2015
Dekan,




Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19701010 199903 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Furqon Hasani

NIM : 10250074

Judul Skripsi : Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial

Pembimbing

Dr. H. Zainudin, M.Ag

NIP.19660827 1999 31001

Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc.

NIP. 19810823 200901 1 007



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Furqon Hasani

NIM : 10250074

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Judul Skripsi : Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Januari 2015

Penyusun



Furqon Hasani

NIM. 10250074

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu terpanjatkan ke Hadirat Allah SWT beserta Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW.

Kupersembahkan Skripsi ini untuk: Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Serta Untuk Ayah dan Bundaku, Ayah Muhammad Jumadi dan Bunda Almarhumah Purnaminingsih yang telah mendidik dan selalu mendoakanku.

HALAMAN MOTTO

Jika hasil yang didapat belum sesuai dengan yang diharapkan, maka rubahlah cara untuk menggapainya, bukan merubah harapannya (Furqon Hasani)

Ketika semua hal tidak sejalan dengan anda, maka ketahuilah bahwa pesawat dan layang-layang dapat terbang karena melawan arah angin, bukan mengikuti arah angin tersebut (Henry Ford)

Seorang petinju tahu betul bahwa resiko bertinju yaitu “kena pukul” , tetapi petinju tidak berdoa untuk tidak terpukul, doanya adalah agar tetap berdiri (Almarhum H. Munif Kakek penulis)

KATA PENGANTAR



Puji syukur *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam”** Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana strata satu dalam Kesejahteraan Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah peneliti lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki peneliti maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun segi ilmiah. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Zainudin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta segenap dosen Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini.

3. Muhammad Izzul Haq. S. sos, M. Sc. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan, masukan serta kesabaran dalam mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi mulai dari pembuatan proposal sampai terselesaikannya karya ilmiah ini.
4. Ayah Muhammad Jumadi dan Bunda Almarhumah Purnaminingsih, selaku orang tua penulis yang telah memperjuangkanku dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada semua adik-adik penulis Yuliani Sholihah, Zidni Nur Rochimi, dan Imad Darussalam yang telah memberikan semangat. Sungguh saya sayang kalian.
5. Kepala BPBD Kabupaten Bantul Yaitu Bapak Dwi Daryanto serta Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bapak Dewanto Dwi Poyono ang telah membantu penulis untuk memberikan data serta informasi untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaganya. Serta semua staf BPBD, anggota TRC, staf Pusdalops dan anggota Forum PRB.
6. Teman-teman Jurusan Kesejahteraan Sosial angkatan 2010 dan keluarga besar Grup IKS Hura-Hura Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah susah senang bersama-sama dalam waktu 4 tahun ini, ku harap ini bukan akhir dari segalanya.

7. Teman seperjuangan Satria Bayu, Indra Haryanto, Sigit Nurdianto, Agung Budi, Aji Reza, Holili terima kasih sudah merelakan waktunya mendengarkan keluh kesah saya.
8. Teman-teman seperjuangan kontrakan Reza Anggriawan dan Ginanjar Ali terima kasih telah mengingatkan telah membantu untuk melancarkan dalam penyusunan skripsi ini. yo're Rawk.
9. Terima kasih untuk Om Anwar Fatwari, Eyang Putri, Almarhum Eyang Kakung, Tante Eny, Tante Ikun, Tante Nurul, Tante Wiwik, terima kasih telah menyemangati dan telah mendengarkan keluh kesah saya. Sungguh saya sayang kalian.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih semuanya.

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. Harapan bagi peneliti, skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

Penyusun,

Furgon Hasani
NIM. 10250074

ABSTRAK

Furqon Hasani, 10250074, penelitian ini berjudul Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam.

Bencana alam adalah peristiwa yang tidak diinginkan oleh setiap manusia akan tetapi, manusia selalu berhubungan dengan alam dan hidup bergantung dengan alam. Alam telah menyediakan semuanya untuk manusia terkadang manusia kurang menjaganya sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi manusia. Walaupun demikian bencana alam dapat ditanggulangi salah satu cara untuk menanggulangi bencana adalah dengan cara mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun dengan cara penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. mitigasi bencana bersifat pencegahan dan mempersiapkan sebelum bencana terjadi. Pemerintah adalah salah satu yang bertanggung jawab besar dalam penanggulangan bencana, dalam Undang-Undang no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul adalah salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanggulangan bencana daerah. Oleh karena itu penulis perlu mengetahui apa sajakah yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam mitigasi bencana alam tingkat daerah Kabupaten Bantul.

Untuk mengetahui hal tersebut, maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-kualitatif*, dan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam memilih subjek penelitian penulis menggunakan teknik *Snowball sampling* dan *Purposive Sampling*. Dari teknik tersebut didapat narasumber yaitu Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Warga Desa, Relawan FPRB.

Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam program BPBD mitigasi ada dua jenis yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural, mitigasi struktural yaitu melakukan pembangunan secara fisik, seperti, pembuatan tanggul banjir, pemasangan alat peringatan dini, pembuatan shelter dan jalur evakuasi. Untuk mitigasi struktural sendiri BPBD Bantul melakukan penguatan kapasitas masyarakat dan melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat. Serta pembuatan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dan kebijakan lain tentang penanggulangan bencana alam.

Kata kunci: Peran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Bantul, Mitigasi Bencana alam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Kerangka Teori	15
H. Metode Penelitian	28
I. Sistematika Pembahasan	35
BAB II: GAMBARAN UMUM LEMBAGA	37
A. Sejarah Berdiri	37
B. Letak Geografis	39
C. Tugas dan Fungsi	40
D. Visi	41
E. Misi	42
F. Landasan Hukum	42

G. Program Kerja	42
H. Tugas Kepala BPBD	44
I. Struktur Organisasi	47
 BAB III: PROGRAM MITIGASI BENCANA ALAM BPBD (BADAN PENANGGULANGGAN BENCANA DAERAH) KABUPATEN BANTUL	48
A. Jenis Mitigasi Bencana	49
1. Mitigasi Struktural	49
2. Mitigasi Non Struktural	50
B. Pendekatan Mitigasi Bencana Alam BPBD Kabupaten Bantul	51
1. Pendekatan Teknis	53
2. Pendekatan Manusia	54
3. Pendekatan Administratif	55
4. Pendekatan Kultural	57
C. Upaya Mitigasi Bencana Alam BPBD Bantul	58
D. Program Mitigasi BPBD Bantul	65
1. Mitigasi Struktural BPBD Bantul	65
2. Mitigasi Non Struktural	87
E. Hambatan BPBD Bantul dalam Mitigasi Bencana.....	93
 BAB IV: PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	100
 DAFTAR PUSTAKA	101
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam bagian awal ini, penulis menjelaskan tentang beberapa istilah kunci dalam penulisan skripsi ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini. Adapun judul skripsi penulis adalah **Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam**, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Dapat juga diartikan langkah yang diambil seseorang atau kelompok dalam menghadapi suatu peristiwa.¹

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia sedang menjalankan suatu peran.²

¹<http://kbbi.web.id/perintah> diakses tanggal 30 juni 2014

² Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 269.

Peran yang dimaksudkan disini adalah peran yang dilakukan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul dalam proses mitigasi bencana di Kabupaten Bantul.

2. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.³

BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten atau Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul.

³ Peraturan Presiden no 08 tahun 2008, *Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, pasal 1 ayat 1

3. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.⁴

Mitigasi merupakan upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana, dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa mitigasi bersifat pencegahan dan mempersiapkan sebelum kejadian.

Dari beberapa penegasan istilah-istilah di atas, maka dirumuskan bahwa pengertian judul di atas adalah kebijakan yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam menghadapi bencana yang akan terjadi, sehingga masyarakat sudah siap dan tanggap darurat bencana ketika bencana terjadi serta dapat mengurangi dampak dari resiko dari bencana.

B. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan alam. Sepanjang masa alam dan lingkungannya telah menyediakan sumber daya demi kesejahteraan hidup manusia. Kemampuan untuk mengelola alam telah membawa manusia dan peradabannya, hidup dari zaman ke zaman sampai sekarang. Namun alam tidak selalu berpihak pada manusia, alam juga bisa menjadi ancaman bagi manusia, jika manusia tidak menjaganya dengan baik. Terkadang Alam bisa

⁴Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana...*, hlm 32

menyebabkan kehancuran, kerusakan dan korban jiwa akibat bencana alam. Berbagai bencana alam bisa terjadi pada kehidupan manusia, hingga kini tidak terhitung kerugian yang disebabkan oleh bencana alam, kerugian fisik dan kerugian jiwa.

Indonesia adalah Negara yang rawan terhadap berbagai macam bencana. Hal ini disebabkan letak geografis wilayah Indonesia terletak di daerah rawan bencana, Indonesia dilewati cincin api (*Ring Of Fire*), serta terdapat lempeng Eurasia dan Indorustralia. Bencana di Indonesia yang sering terjadi adalah bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, badai tropis, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Bencana non alam seperti ledakan hama, wabah penyakit, kejadian luar biasa, maupun bencana sosial seperti kerusuhan, konflik sosial dan terorisme.⁵

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang rawan bencana, bencana sering terjadi di Yogyakarta antara lain seperti erupsi gunung Merapi tahun 2010. Pada musim hujan November 2013 terjadi banjir di beberapa kecamatan di daerah Kabupaten Bantul yaitu Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Piyungan. Di Kecamatan Piyungan yang paling besar mengalami kerugian. Sedangkan di Kecamatan Dlingo sampai menyebabkan tanah longsor, menyebabkan hancurnya rumah warga.⁶ Bencana yang terbesar

⁵ Sunarto, *Prosiding Workshop Bencana Strategi Pengurangan Resiko Bencana Kebumihan*, Yogyakarta : 2008 LPPM UGM-Hilink Project-Jurusan Teknik Geologi UGM- British Council, hlm. 122

⁶ <http://krjogja.com/read/194053/hujan-deras-sejak-siang-timbulkan-longsor-dan-banjir-di-bantul.kr> diakses 13 april 2014

adalah bencana gempa bumi tahun 2006 berpusat di Kabupaten Bantul, dan semua Kecamatan dari total 17 Kecamatan merasakan goncangan, bahkan sampai terasa di provinsi Jawa Tengah.

Bantul adalah salah satu Kabupaten yang rawan bencana alam, seperti keterangan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto. “Sejak 2012 hingga awal tahun 2013, Bantul telah terjadi 287 bencana alam. Bencana angin tercatat 145 kejadian, banjir lima hingga enam kejadian, tanah longsor 66 kejadian, dan kebakaran 77 kejadian”.⁷ Maka dari itu pemerintah Kabupaten Bantul harus siap siaga untuk menghadapi ancaman bencana yang akan terjadi, kesiapsiagaan bencana menjadi sangat penting jika daerah tersebut telah dipetakan menjadi daerah rawan bencana.

Bencana alam tidak dapat diperkirakan kapan dan dimana terjadinya, oleh karena itu kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam menjadi sangat penting dan harus menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat, yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana. Pemerintah bertanggung jawab dalam menangani dan menanggulangi bencana seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.⁸ Oleh sebab itu pemerintah

⁷ <http://beritajogja.co.id/2013/01/15/bantul-rawan-bencana/> diakses 13 april 2014

⁸ Undang-undang no 24 tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana* Bab III pasal 5

Kabupaten Bantul pada tahun 2010 menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana dan dalam mengimplementasikan dan menyelenggarakan peraturan daerah no 05 tahun 2010 ini adalah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang telah disebutkan dalam Bab IV Kelembagaan pasal 9.

Mengelola bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan cara mendadak atau insidentil, tetapi harus dilakukan secara terencana dengan manajemen yang baik, jauh sebelum suatu bencana terjadi melalui suatu proses yang disebut manajemen bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat secara luas. Dalam pengertian ini, setiap individu ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk keamanan dan keselamatan dirinya, keluarga, maupun lingkungannya. Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi penanggung jawab pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 01 tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 4, Pemerintah Daerah memberikan layanan kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana secara adil dan merata dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan tingkat kerentanan.⁹

Berdasarkan pengalaman dalam penanggulangan bencana, upaya kesiapsiagaan dan mitigasi merupakan faktor utama dalam menghadapi bencana. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya strategis yang dilakukan secara terintegrasi lintas pelaku dan pemangku kebijakan. Penanggulangan bencana adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak yang sangat merugikan dari ancaman bencana, kegiatan yang dilakukan adalah pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.¹⁰ Salah satu cara dalam pencegahan bencana dan mengurangi dampak dari bencana yaitu mitigasi.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.¹¹ Mitigasi sangat diperlukan karena mitigasi bertujuan agar masyarakat menjadi sadar serta bersiaga untuk menghadapi bencana yang tidak diperkirakan datangnya..

Mitigasi bencana dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana. Kegiatan mitigasi bencana memfokuskan perhatian pada pengurangan dampak dari ancaman sehingga akan mengurangi

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 01 tahun 2013 *Tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana* Pasal 4

¹⁰ Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Perlindungan Sosial Korban Bencana alam*, jakarta, 2012.hlm. 6.

¹¹ Undang-undang no 24 tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana* pasal 1 ayat 9

kemungkinan dampak negative bencana. Kegiatan mitigasi meliputi upaya-upaya peraturan dan pengaturan, pemberian sanksi dan penghargaan untuk mendorong perilaku yang tepat, dan upaya-upaya penyuluhan serta penyediaan informasi untuk memberikan kesadaran dan peringatan kepada manusia terhadap usaha untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Mitigasi bencana meliputi mitigasi struktural misalnya membuat cekdam, bendungan, tanggul sungai dan lain-lain. Sedangkan mitigasi non-struktural misalnya membuat peraturan tata ruang, pelatihan, dan lain-lain.¹²

Proses mitigasi bencana memiliki standar operasional prosedur (SOP). Menurut Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), standar mitigasi bencana alam adalah pemetaan daerah rawan bencana alam, pengembangan kelembagaan pengerahan SDM perlindungan sosial, pendampingan sosial, pendampingan psikososial, publikasi, dan monitoring dan evaluasi.

Pasca bencana Gempa Bumi Bantul tahun 2006 Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten tercepat dalam hal pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi, akan tetapi jika tidak diimbangi dengan mitigasi bencana yang baik maka akan sangat merugikan dari segi kerugian fisik dan kerugian korban jiwa, karena rekonstruksi dan rehabilitasi memerlukan banyak sekali biaya,

¹² Nurjanah DKK, *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 54

sedangkan jika pemerintah melakukan tindakan *preventif* (pencegahan) dan mengurangi resiko dampak dari bencana akan sangat lebih menguntungkan.¹³

Mitigasi bencana sangat penting karena dapat mengurangi dampak dari ancaman bencana yang sangat merugikan secara materiil dan non materiil. Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko terkait dengan ancaman-ancaman karena ulah manusia dan ancaman alam yang sudah diketahui dan proses untuk respon terhadap bencana yang betul-betul terjadi. Usaha mitigasi dapat berupa prabencana, saat bencana dan pasca bencana. Prabencana merupakan kesiapsiagaan atau upaya memberikan pemahaman pada penduduk untuk mengantisipasi bencana melalui pemberian informasi, peningkatan kesiagaan kalau terjadi bencana ada langkah-langkah untuk memperkecil risiko bencana. Pada saat kejadian merupakan tanggap darurat yaitu upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban, harta benda, evakuasi dan pengungsian. Pascabencana merupakan pemulihan rehabilitasi dan pembangunan.

¹³Sriharini. *MANAJEMEN PASCA BENCANA ALAM Studi tentang Manajemen Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Kecamatan Banguntapan Kabupatn Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta* (Kurnia Kalam Semesta: Yogyakarta, 2009), hlm. 6.

Undang-undang Penanggulangan Bencana No 24/2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, merupakan dasar pembentukan dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan risiko. Pembentukan BPBD didasari oleh regulasi daerah, Pemerintah pusat menyarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hingga saat ini, sebagian besar provinsi rawan bencana secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Kabupaten dan Kota dapat memutuskan perlunya pendirian BPBD di daerahnya menurut tingkat ancaman bencana yang ada.

Penulis mengambil BPBD Bantul sebagai tempat penelitian sebab, menurut Undang-Undang nomer 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah adalah yang paling bertanggung jawab untuk menangani bencana alam baik sebelum, ketika terjadi dan sesudah terjadi bencana. Oleh karena itu Pemerintah membentuk Badan yang bertanggung jawab untuk menangani permasalahan tersebut. Bantul adalah kabupaten yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi, oleh karena itu penulis ingin mengetahui peran dan program untuk menanggulangi bencana alam khususnya dibidang mitigasi bencana.

C. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang diatas, maka perlu perumusan masalah agar dapat secara terperinci permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul dalam melaksanakan mitigasi?
2. Apa saja hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul dalam melaksanakan mitigasi bencana tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam manajemen bencana tentang mitigasi bencana.
2. Mengetahui program mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka kegunaan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagi penulis, menambah wawasan serta menambah pengetahuan

baru bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa kesejahteraan sosial.

2. Secara teoritis, penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu bentuk informasi yang ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bencana alam.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dan pendapat terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan program mitigasi bencana sehingga penelitian ini bisa juga dijadikan bahan pertimbangan dalam sebuah kebijakan, program kerja dan keputusan dalam mitigasi bencana yang akan diambil oleh Kabupaten Bantul dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, Peneliti mencari dan menemukan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan Judul skripsi **Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam** diantaranya adalah:

Pertama disertasi Sriharini¹⁴, dosen Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul **Manajemen Pasca Bencana Alam Studi Tentang Menejemen Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Tanggal 27**

¹⁴Sriharini. *MANAJEMEN PASCA BENCANA ALAM...*, (Kurnia kalam Semesta: Yogyakarta, 2009)

Mei 2006 di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana gempa tersebut telah membuahkan hasil yang luar biasa. Dalam waktu satu tahun pasca gempa bumi, lebih dari 80 persen warga telah berhasil memanfaatkan rumah hasil rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kedua Skripsi Baldatun Muhammad¹⁵, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, tahun 2012 yang berjudul “*Manajemen Relawan Tim Psikososial Pendampingan Anak Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)*” hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam menangani dan memberikan pertolongan terhadap orang yang sedang mengalami musibah harus dikelola dengan baik agar sesuai dengan kebutuhan, cara pertolongan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Ketiga Skripsi Lalu A Lutfhi Ghazali¹⁶, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, tahun 2012 yang berjudul “*Manajemen Sistem Informasi Kebencanaan: Studi Kasus Jogja Tanggap Cepat Dalam Mengelola Informasi Bencana Alam Erupsi Merapi Di Yogyakarta*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa

¹⁵Baldatun Muhammad, *Manajemen Relawan Tim Psikososial Pendampingan Anak Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)*, Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

¹⁶Lalu A Lutfhi Ghazali, *Manajemen Sistem Informasi Kebencanaan: Studi Kasus Jogja Tanggap Cepat Dalam Mengelola Informasi Bencana Alam Erupsi Merapi Di Yogyakarta*, Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

manajemen informasi sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi secara cepat pada khalayak agar cepat dan tanggap untuk mengambil keputusan dan untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dalam konteks manajemen.

Keempat, Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 2 nomer 2 tahun 2011 Penulis Setya Winarno¹⁷, *House Seismic Vulnerability and Mitigation Strategies: Case of Yogyakarta City*, Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 2 Nomor 2, Tahun 2011. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Yogyakarta tentang kerentanan ancaman gempa bumi sangat tinggi, akan tetapi masih banyak rekonstruksi rumah menggunakan bahan bangunan yang berat, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 84.8% rumah di Yogyakarta adalah rumah non-rekayasa dan sangat rentan terhadap gempa bumi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang terdahulu adalah penelitian ini meneliti tentang peran mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, serta meneliti tentang program mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Bantul. Perbedaan yang paling mendasar dari penelitian-penelitian diatas adalah penelitian ini meneliti persiapan sebelum terjadi bencana tindakan atau pencegahan dan pengurangan dampak negatif dari bencana alam

Penelitian terdahulu berfokus tentang manajemen bencana

¹⁷ Setya Winarno, *House Seismic Vulnerability and Mitigation Strategies: Case of Yogyakarta City*, Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 2 Nomor 2, Tahun 2011, hlm 1-8.

sedangkan penelitian ini berfokus pada mitigasi bencana, yang mana mitigasi bencana tersebut terdapat dalam siklus manajemen bencana.

G. Kerangka Teori

1. Peran BPBD

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia sedang menjalankan suatu peran.¹⁸

Peran berarti laku, bertindak. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu **pertama** penjelasan *histories*. Menurut penjelasan *histories*, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. **Kedua**, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.¹⁹

¹⁸ Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, hlm. 269

¹⁹ E, st. Harahap, dkk. *Kamus Indonesia Ketjik*, (Jakarta: Penerbit B. Angin, 2007), hlm. 854.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.²⁰

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkah laku atau tindakan yang dimiliki oleh lembaga BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikatakan menjalankan peran, manakala BPBD menjalankan hak dan kewajiban yang telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari status yang disandangnya.

2. Manajemen Bencana

a. Pengertian Manajemen Bencana

Manajemen Bencana diambil dari kata *disaster management* (penganggulangan bencana atau (manajemen bencana), maka penanggulangan dapat diartikan sebagai manajemen. Fuad, dkk²¹ berpendapat bahwa “manajemen merupakan suatu proses yang

²⁰Peraturan Presiden no 08 tahun 2008, *Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, pasal 1 ayat 1

²¹ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 94.

melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Inu Kencana²², yang mengatakan bahwa “manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Dengan kata lain, berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya”.

Manajemen bencana adalah upaya mengelola hal-hal yang berkaitan dengan bencana dengan tujuan utama menanggulangi bencana serta menangani para korban dan pengungsi. Manajemen bencana juga dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan untuk mengantisipasi bencana, yang meliputi aspek perencanaan, saat dan sesudah terjadi bencana, mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.²³

²² Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, (SANRI)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 117.

²³ Sriharini, *MANAJEMEN PASCA BENCANA ALAM...*, (Kurnia kalam Semesta: Yogyakarta, 2009), hlm 31.

Definisi lain tentang manajemen bencana seperti yang didefinisikan Hadi Purnomo,²⁴ merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana. Dan menurutnya, tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan banyak sumber ekonomis.

Adapun Carter²⁵ mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan.

Mengelola bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan cara dadakan atau insidentil, tetapi harus dilakukan secara terencana dengan manajemen yang baik, jauh sebelum suatu bencana terjadi melalui suatu proses yang disebut manajemen bencana.

Peyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko

²⁴ Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, *Manajemen Bencana* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), hlm.93.

²⁵ *Ibid.*, hlm.93.

timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.²⁶

Tahapan manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan sebagai berikut²⁷:

1. Pra bencana, pra bencana dilakukan sebelum terjadinya bencana tahapan dari pra bencana adalah: Kesiagaan, Peringatan dini, Mitigasi.
2. Saat terjadi bencana yang dilakukan adalah tanggap darurat bencana.
3. Pasca bencana, tahapan yang harus dilakukan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan dari manajemen bencana di antaranya, untuk mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan, masyarakat negara, mengurangi penderitaan korban bencana, mempercepat pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa yang merupakan salah satu prinsip dan tujuan dari penanggulangan bencana

²⁶Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), hlm. 27.

²⁷*Ibid*, hlm. 31

adalah koordinasi sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi sangat berhubungan erat dengan penanggulangan bencana melalui tahapan-tahapan yang dilakukan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana alam.

3. Mitigasi Bencana

Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun peningkatan penyadaran dan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non-struktural).²⁸ Dengan demikian mitigasi bencana merupakan tindakan untuk mengurangi resiko dari bencana alam yang mengancam, serta merugikan.

- a. Tujuan mitigasi secara umum adalah; upaya untuk menekan dan mengurangi dampak bencana alam yang berpotensi terjadi.²⁹
- b. Pelaksanaan kegiatan mitigasi:
 - 1) Pemetaan Sosial Daerah Rawan Bencana Alam, kegiatan pemetaan sosial merupakan upaya untuk penyediaan data dan informasi tentang potensi bencana di daerah rawan bencana, yang hasilnya dapat dipergunakan untuk perumusan

²⁸ Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Perlindungan Sosial Korban Bencana alam*, jakarta, 2012.hlm 20.

²⁹*Ibid.*, hlm.20

kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana.

- 2) Pengembangan Kelembagaan (Kemitraan dan Jejaring Kerja), salah satu komponen ketahanan menghadapi ancaman bencana adalah kemampuan kelembagaan ditingkat masyarakat dalam menanggulangi bencana. Dalam pengembangan kelembagaan ini harus saling mempererat hubungan-hubungan sosial, dalam konteks mitigasi bencana ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menanggulangi bencana di wilayahnya.
- 3) Pengerahan SDM Perlindungan Sosial, pengerahan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan perlindungan sosial, khususnya pada kegiatan mitigasi bencana terkait dengan berbagai kegiatan saat penanggulangan bencana.
- 4) Pendampingan Sosial, pendampingan sosial dalam kegiatan mitigasi bencana adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di daerah rawan bencana alam, agar mereka tetap dapat melaksanakan keberfungsian sosial.

- 5) Pendampingan Psikososial, pendampingan psikososial dalam mitigasi bencana adalah suatu proses pertolongan yang dilakukan oleh seorang pendamping untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat dalam mengatasi masalah psikososial berkaitan dengan ancaman bencana alam yang mungkin terjadi.
- 6) Publikasi, aspek informasi dan komunikasi dalam kegiatan mitigasi menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko yang dihadapi masyarakat jika suatu bencana terjadi. Bagi sebagian besar srangan bencana yang cepat, publikasi dapat menyelamatkan banyak kehidupan. Dengan memberi pemberitahuan yang memadai terhadap masyarakat yang rentan akan datangnya satu bencana, mereka dapat meloloskan diri dari kejadian itu atau mengambil tindakan berjaga-jaga untuk mengurangi bencana.
- 7) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mitigasi, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi program

mitigasi bencana berjalan sesuai dengan rencana.³⁰

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana, dari batasan ini sangat jelas bahwa mitigasi bencana bersifat pencegahan sebelum terjadi bencana.

Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komperhensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain³¹:

a. Pendekatan Teknis

Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana misalnya:

1. Membuat rancangan atau disain yang kokoh dari bangunan sehingga tahan terhadap gempa.
2. Membuat material yang tahan terhadap bencana, missal material tahan dari api.
3. Membuat rancangan teknis pengaman, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur, tanggul tangki untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya.

³⁰*Ibid.*, hlm. 23.

³¹ Soehatman ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), hlm.33

b. Pendekatan Manusia

Pendekatan secara manusia ditunjukkan untuk membentuk manusia yang paham serta sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya.

c. Pendekatan Administratif

Pemerintah atau pemimpin organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana khususnya di tahap mitigasi sebagai contoh:

1. Penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek resiko bencana.
2. Penyusunan perijinan dengan memasukan aspek analisa risiko bencana.
3. Penerapan kajian bencana untuk setiap kegiatan dan pembangunan industri berisiko tinggi.
4. Mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bencana di seluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan.
5. Menyampaikan prosedur tanggap darurat dan organisasi baik pemerintahan maupun industri berisiko tinggi.

d. Pendekatan Kultural

Masih ada anggapan dikalangan masyarakat bahwa bencana itu adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya. Hal ini tidak

sepenuhnya benar, karena dengan kemampuan berfikir dan berbuat, manusia dapat berupaya menjauhkan diri dari bencana dan sekaligus mengurangi keparahannya.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kultural untuk meningkatkan kesadaran mengenai bencana. Melalui pendekatan kultural, pencegahan bencana disesuaikan dengan kearifan masyarakat lokal yang telah membudaya sejak lama.

Upaya pengendalian dan pencegahan bencana disesuaikan dengan budaya lokal dan tradisi yang telah berkembang ditengah masyarakat, sebaiknya pemerintah daerah setempat mengembangkan budaya dan tradisi lokal tersebut untuk membangun kesadaran akan bencana di tengah masyarakat.³²

4. Kebijakan pemerintah dalam Mitigasi Bencana Alam

a. Peraturan Daerah No 05 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.³³ Setiap perundang-undangan adalah

³²*Ibid.*, hlm. 34.

³³Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. (Bandung, Alfabeta: 2011), hlm. 3.

kebijakan, namun tidak setiap kebijakan diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan.³⁴ Dengan ini maka pemerintah menetapkan kebijakan yang berupa undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 05 tahun 2010, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah *serangkaian upaya yang meliputi penghitungan tingkat risiko bencana, penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi*. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 05 tahun 2010, tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;

³⁴*Ibid.*, hlm 4.

6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya adalah mitigasi yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 nomor 17, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana pasal 42 kegiatan pra bencana terdapat beberapa tahapan yaitu:

1. Kesiapsiagaan
2. Peringatan dini, dan
3. Mitigasi bencana

Kegiatan yang dilakukan ketika mitigasi yang disebutkan dalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Pasal 45 adalah :

1. Pelaksanaan penataan ruang;
2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan

3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”. Rumusan penanggulangan bencana dari Undang-Undang tersebut mengandung dua pengertian dasar yaitu:

1. Penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus.
2. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

H. Metodologi penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, **Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam**. Maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu berusaha mengungkapkan suatu masalah yang terjadi kemudian menganalisis

informasi data yang didapat. Data tersebut dapat berupa naskah wawancara, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.³⁵

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.³⁶ Sedangkan obyek penelitian adalah sesuatu yang hendak diteliti.³⁷ Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini adalah: ketua BPBD dan segenap staf dari segala bidang sampai ke relawan, Kepala Bidang Mitigasi bencana di BPBD Bantul serta masyarakat Desa Tangguh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Dan data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan, data yang dikumpulkan haruslah data yang benar.

³⁵Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 11.

³⁶ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta:PT. Raja grafindo Persada, 1998), hlm 135

³⁷*Ibid*,.hlm 92

Agar data yang dikumpulkan baik dan benar, instrumen pengumpulan datanya pun harus baik. Instrumen pengumpulan data tersebut melalui:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁸ Dalam observasi ini penulis melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan.³⁹ Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan keadaan sebenarnya. Adapun metode pengamatan yang dilakukan adalah metode pengamatan secara langsung (*direct observation*), yakni pengamatan yang dilakukan tanpa perantara terhadap obyek yang akan diteliti.⁴⁰

Observasi yang peneliti lakukan ialah melihat dan mengamati program-program mitigasi bencana dan kegiatan-kegiatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, serta lainnya yang terkait dengan manajemen bencana alam dan mitigasi bencana alam.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserach II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.136

³⁹ *Ibid*, hlm.125

⁴⁰ Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur Strategi* (Bandung: Angkasa, 1987), hlm.91

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara (peneliti) dan informan, menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Menurut Sutrisno Hadi.⁴¹ Metode interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴² Pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁴³ Disini peneliti telah melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada Kepala BPBD Bantul tentang bagaimana proses dan peran dari BPBD dalam proses mitigasi bencana.

Dalam proses wawancara ini, peneliti menggali program-program yang dilakukan BPBD Bantul dalam manajemen bencana dan kegiatan mitigasi dan sebagainya yang mendukung peneliti dalam

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi...*, hlm. 193

⁴² *Ibid.*, hlm.193

⁴³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 135

menyelesaikan skripsi ini. Teknik dalam wawancara ini penulis menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis besar yang akan ditanyakan. Pewawancara melakukan wawancara dengan Kepala Seksi mitigasi atau kesiapsiagaan, Kepala Seksi terkait, staf relawan dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang terdahulu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya video foto dan data-data jurnal kegiatan mitigasi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁴

Teknik dokumentasi ialah cara peneliti untuk memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang berupa gambar, foto dan lampiran dari responden yang mendukung penelitian. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu buku atau jurnal kegiatan, video, klipping,

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 329.

dokumen pemerintah atau swasta, data di server, data tersimpan di website, dan lain-lain.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Selain itu, analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah. Ketika ada, masalah tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan benar. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan jelas dan benar. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan jelas makna dari indikator-indikator yang ada, membandingkan dan menghubungkan antara indikator yang satu dengan indikator lain. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang dianalisis.⁴⁵

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Maka itu perlu segera dilakukan

⁴⁵Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 165.

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memepermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi atau yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur yang jelas.⁴⁶ Menyeleksi dan menyusun data yang telah dipeoleh dari survey dengan sistematik sesuai dengan pembahsan yang yang telah direncanakan.

3. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan keputusan merupakan tahap akhir dalam penelitian kualitatif yang mengarah pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan.⁴⁷ Melakukan interpretasi scukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

⁴⁶*Ibid.,.hlm. 176.*

⁴⁷*Ibid., hlm 179.*

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman skripsi, peneliti menetapkan sistematika pembahasan kedalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan supaya pembahasan saling terkait dan menghasilkan penulisan dan penyusunan yang secara utuh dan sistematis.

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Dalam sistematika pembahasan bagian awal merupakan halaman judul, nota dinas dan pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, aafter isi serta abstraksi.

Sedangkan pada bagian utama terdiri dari:

BAB I, merupakan pendahuluan tentang peegasan istilah, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sisematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang gambaran umum BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Alam) Kabupaten Bantul meliputi: letak geografis, sejarah berdiri, visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaen Bantul, sturuktur organisasi, sarana dan pra sarana, program mitigasi mitigasi bencana.

BAB III, berisi tentang hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah yaitu peran yan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam mitigasi bencana dan hambatan yang dialami Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan mitigasi bencana.

BAB IV, sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis.

Kemudian pada bagian akhir dalam skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini membahas dan menganalisis permasalahan pokok tentang “Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam”. Dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan terkait dengan pokok masalah tersebut, sebagai berikut.

Dalam melaksanakan peran dalam mitigasi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menggunakan beberapa pendekatan untuk menjalankan program mitigasi struktural dan non struktural, pendekatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Teknis

Pendekatan teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan dari suatu bencana alam, pendekatan teknis yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul seperti melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan mitigasi bencana alam.

2. Pendekatan Manusia

Pendekatan manusia secara umum ditujukan untuk membentuk manusia yang paham serta sadar mengenai bahaya bencana, untuk itu perilaku dan cara hidup manusia harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi timbulnya bencana yang akan dihadapi.

Pendekatan manusia yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengoptimalkan mitigasi bencana di Kabupaten Bantul, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul memperkuat Forum Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB) untuk meningkatkan sinergi dan mempercepat penanggulangan bencana di daerah

3. Pendekatan Administratif

Pemerintah dan pemimpin organisasi dapat melakukan pendekatan secara administratif dalam manajemen bencana khususnya ditahap mitigasi bencana, pembuatan kebijakan adalah salah satu pendekatan administratif yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, selain pembuatan kebijakan Penanggulangan Bencana, BPBD melaksanakan pelatihan-pelatihan simulasi bencana diseluruh aspek masyarakat dan lembaga pendidikan serta melakukan kajian resiko bencana.

Telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana adalah salah satu pendekatan administratif dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

4. Pendekatan Kultural

Upaya pengendalian dan pencegahan bencana disesuaikan dengan budaya lokal dan tradisi yang telah berkembang ditengah masyarakat, sebaiknya pemerintah daerah setempat mengembangkan budaya dan tradisi lokal tersebut untuk membangun kesadaran akan bencana di tengah masyarakat.

Untuk saat ini yang dapat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam pendekatan kultural adalah menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap bencana alam seperti mengenal daerah lingkungan tempat mereka tinggal dan serta menjaga alam serta melestarikan lingkungan

Upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah mitigasi struktural dan mitigasi non struktural yaitu:

1. Mitigasi Bencana Struktural BPBD Bantul

Mitigasi bencana struktural adalah tindakan *preventive* yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana alam atau mengurangi dampak kerugian yang disebabkan oleh bencana alam.

Mitigasi struktural pada umumnya adalah membangun secara fisik untuk penanggulangan bencana sebelum terjadinya bencana alam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan mitigasi struktural untuk mencegah dan mengurangi terjadinya bencana, mitigasi struktural yang dilakukan oleh BPBD Bantul adalah membangun fasilitas publik seperti shelter untuk pengungsi, rambu-rambu untuk jalur evakuasi, alat peringatan dini tsunami dan gelombang ekstim, pembangunan bronjong-bronjong sebagai tanggul sungai di bantaran sungai yang melewati pemukiman warga serta penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Bantul.

2. Mitigasi Bencana Non struktural BPBD Bantul

Mitigasi bencana non struktural adalah salah upaya dampak bencana selain dari upaya mitigasi struktural. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu Peraturan Daerah. Undang-Undang Penanggulangan Bencana adalah upaya mitigasi non structural yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Contoh lainnya adalah Peraturan Tata ruang, sampai menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat dan kesiapsiagaan.

Kebijakan non struktural atau mitigasi non struktural meliputi legislasi, perencanaan peraturan mitigasi, dan penguatan masyarakat dalam mitigasi bencana.

Hambatan yang dihadapi BPBD Kabupaten Bantul adalah mengubah paradigma masyarakat dalam menghadapi bencana, serta hambatan lain seperti kurangnya komunikasi dengan LSM-LSM dan SKPD terkait yang bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Bantul.

B. Saran

Saran untuk lembaga BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul untuk menjadi lebih baik dan maksimal untuk menjalankan program dan kegiatan mitigasi bencana, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Memaksimalkan kerja sama dengan SKPD, LSM, Perguruan Tinggi untuk meningkatkan program-program mitigasi yang memerlukan banyak alat dan dana.
2. Menjalankan program-program mitigasi bencana yang belum terlaksana serta mengevaluasi dan mengecek kembali infrastruktur secara rutin.
3. Membangun shelter pengungsian diseluruh daerah yang berpotensi bencana alam yang tinggi
4. Membangun kerjasama dan meningkatkan peran perusahaan negeri maupun swasta untuk membantu menyelenggarakan program mitigasi, seperti memberikan CSR (*corporate social responsibility*) serta peran lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. (Bandung, Alfabeta: 2011)

Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, *Manajemen Bencana* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010)

Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk-Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Kementrian RI, Dirjen perlindungan dan jaminan sosial, *Pedoman Umum Perlindungan Sosial Korban Bencana alam*, (jakarta, 2012)

Lexy j. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

M. Fuad, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 2006)

Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur Strategi* (Bandung: Angkasa, 1987)

Nurjanah DKK, *Manajmen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2011)

RAD (Rencana Aksi Daerah) Kabupaten Bantul, tahun 2014-2017

Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011)

Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 269.

Sunartro, *prosiding workshop bencana strategi Pengurangan Resiko Bencana Kebumian*, Yogyakarta : 2008 LPPM UGM-Hilink Project-Jurusan Teknik Geologi UGM- British Council.

Sriharini. *MANAJEMEN PASCA BENCANA ALAM Studi Tentang Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Kecamatan Bnaguntapan Kabupaten Bantul daerah Istimewa Yogyakarta* (Kurnia kalam Semesta: Yogyakarta, 2009)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserarrh II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta:PT. Raja grafindo Persada, 1998)

Internet

<http://kbbi.web.id/perintah> diakses tanggal 29 april 2014

<http://krjogja.com/read/194053/hujan-deras-sejak-siang-timbulkan-longsor-dan-banjir-di-bantul.kr> diakses 13 april 2014 diakses tanggal 29 april 2014

<http://beritajogja.co.id/2013/01/15/bantul-rawan-bencana/> diakses 13 april 2014

Undang-undang

Undang-undang No 24 tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana*

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.05 tahun 2010 tentang *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*.

Peraturan Presiden no 08 tahun 2008, *Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, pasal 1 ayat 1

LAMPIRAN



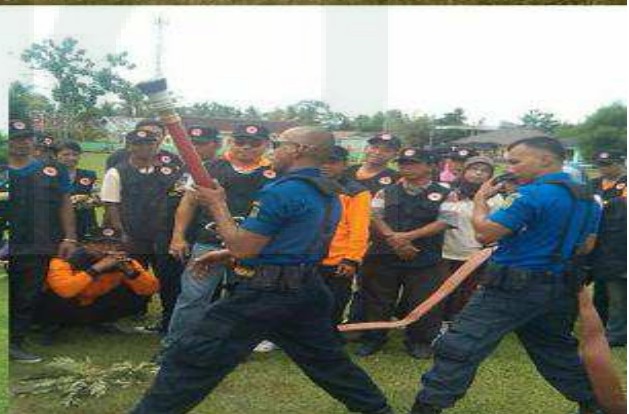
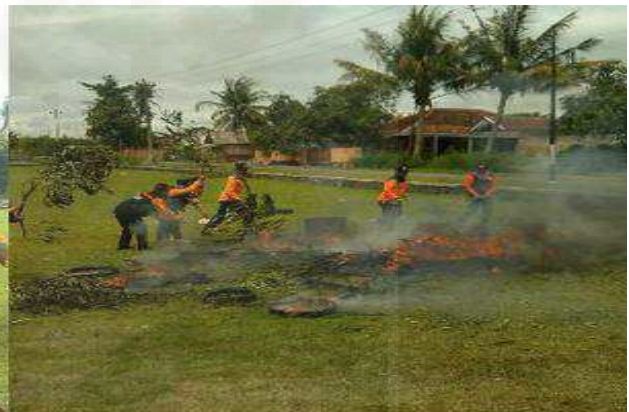
Sosialisasi dan simulasi bencana gempa bumi di SKMN 1 Sewon Bantul dilakukan saat MOS (Masa Oientasi siswa)



Sosialisasi dan simulasi bencana gempa bumi di SMAN 1 Bantul dilakukan saat MOS (Masa Oientasi siswa)



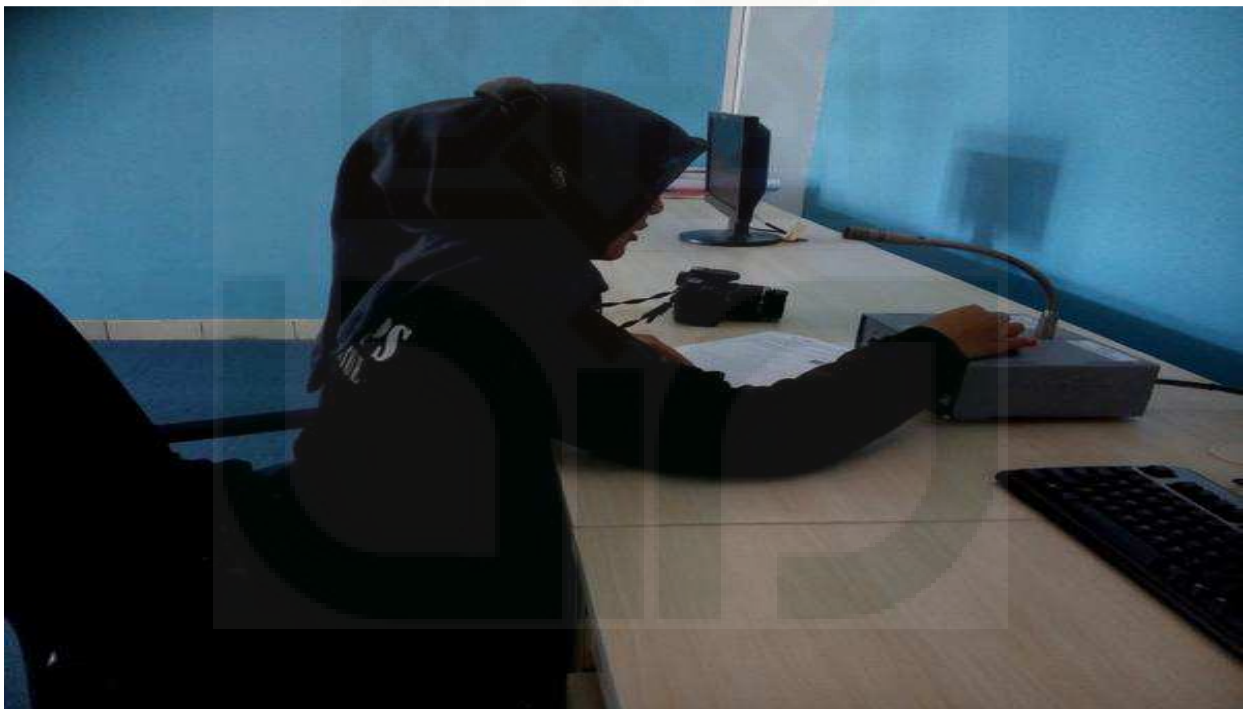
Shelter pengungsian



Pelatihan relawan dan TRC (Tim Reaksi Cepat)



Pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi



Proses uji coba sirine peringatan dini



Proses kegiatan penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2926 / S1 / 2014

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/Reg/V/223/8/2014
Tanggal : 22 Agustus 2014 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : **FURQON HASANI**
P. T / Alamat : **Fak. Dakwah dan komunikasi, ilmu kesejahteraan sosial, UIN Sunan Kalijaga Jl. Marda Adisucipto Yogyakarta 10250074**
NIP/NIM/No. KTP : **10250074**
Tema/Judul Kegiatan : **PERAN BPBD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) KABUPATEN BANTUL DALAM MANAJEMEN BENCANA ALAM: STUDI KASUS MITIGASI BENCANA**
Lokasi : **BPBD Kab. Bantul**
Waktu : **27 Agustus 2014 s.d 27 November 2014**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 27 Agustus 2014

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data
Penelitian dan Pengembangan,
u.b. Kasubid. DSP

Ir. Edi Purwanto, M.Eng
NIP. 195407101997031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. BPBD Kab. Bantul
4. Dekan Fak. Dakwah dan komunikasi, ilmu kesejahteraan sosial, UIN Sunan Kalijaga
5. Yang Bersangkutan (Mahasiswa)



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/223/8/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA** Nomor : **UIN.02/WD.I/PP.OO.9/1490/2014**
Tanggal : **20 AGUSTUS 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FURQON HASANI** NIP/NIM : **10250074**
Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERAN BPPD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) KABUPATEN BANTUL
DALAM MANAJEMEN BENCANA ALAM: STUDI KASUS MITIGASI BENCANA**
Lokasi : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY**
Waktu : **22 AGUSTUS 2014 s/d 22 NOVEMBER 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **22 AGUSTUS 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : FURQON HASANI
NIM : 10250074
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan/Prodi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	40	E
3.	Microsoft Power Point	85	B
4.	Microsoft Internet	90	A
5.	Total Nilai	75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

KEMENTERIAN Agama, 15 Januari 2015



Agung Fauzante, Ph.D.
NIP. 197701032005011003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Furqon Hasani
NIM : 10250074
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Ilmu Kesejahteraan Sosial
Tempat tanggal lahir: Klaten, 26 Februari 1992

Telah berhasil menyelesaikan ujian sertifikasi Baca Tulis Al-Quran di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga dengan predikat:

Baik

Direktur

Laboratorium Agama
Masjid Sunan Kalijaga

Dikeluarkan pada: 15 Januari 2015


Dr. Nurul Hak, M.Hum.

NIP: 197001171999031001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sertifikat

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/ 2885/ 2013

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Furqon Hasani
Tempat, dan Tanggal Lahir : Klaten, 26 Februari 1992
Nomor Induk Mahasiswa : 10250074
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2012/2013 (Angkatan ke-80), di :

Lokasi : Giriharjo 2
Kecamatan : Panggang
Kabupaten/Kota : Gunungkidul
Daerah Istimewa Yogyakarta

dari tanggal 16 Juli s/d. 9 September 2013 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95.00 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Ketua,


Zamzani Afandi, M.Ag., Ph.D
NIP. : 19631111 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA



Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2845.a/2010

Sertifikat

diberikan kepada:

NAMA : FURQON HASANI
NIM : 10250074
Jurusan/Prodi : IKS

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2010/2011
Tanggal 28 s.d. 30 September 2010 (20 jam pelajaran) sebagai:

PESERTA

Yogyakarta, 1 Oktober 2010

KEMENTERIAN AGAMA RI
Ditandatangani oleh
Kepala Biro Akademik, Penelitian dan
Pembelajaran
Prof. Dr. H. Sidiq Syarifuddin, M.A.
NIP. 195310611987031002



PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
UIN SUNAN KALIJAGA
Jl. Marsda Adisucipto Tlp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NOMOR : UIN.02/IKS/PP.009/ 294a/ 2014

Furqon Hasani
NTM : 10250074

yang telah menempuh Pratik Pekerjaan Sosial (PPS) I, II, dan III selama 900 jam, dengan keahlian engagement, assesment, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo, Intervensi makro dan evaluasi program.

Yogyakarta, 19 Februari 2014





شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PP.00.9/908.C/2015

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن :

الاسم : Furqon Hasani

تاريخ الميلاد : ٢٦ فبراير ١٩٩٢

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٣ يناير ٢٠١٥ ،
وحصل على درجة :

٥٥	فهم المسموع
٥٥	التركيب النحوية والتعابير الكتابية
٢٣	فهم المقروء
٤٤٣	مجموع الدرجات

*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوجاكرتا، ٢١ يناير ٢٠١٥

الدكتور هشام زيني الماجستير

رقم التوظيف : ١٠٠٢ ١٩٩١٠٣ ١٩٦٣١١٠٩





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
Jl. Marsda Adisucipto , Phone. (0274) 550727 Yogyakarta 55281

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/1860.b/2014

Herewith the undersigned certifies that:

Name : Furqon Hasani
Date of Birth : February 26, 1992
Sex : Male

took TOEC (Test of English Competence) held on May 23, 2014 by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	43
Structure & Written Expression	48
Reading Comprehension	41
Total Score	440

*Validity : 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, May 28, 2014

Director

Dr. Hisyam Zaini, M.A.

NIP. 19631109 199103 1 002

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Furqon Hasani
Tempat/tgl lahir : Klaten, 26 Febuari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Sadikan, Pondok, Karanganom, Klaten
Email : furkonhasani74@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

SD : MI Muhammadiyah Pondok, Karanganom
SMP : SMP Muhammadiyah 2 Jatinom, Klaten
SMA : SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, Klaten
Perguruan Tinggi : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.